

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam satu paket undang-undang yaitu Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah menjelaskan tentang tanggungjawab politik dan administratif pemerintah pusat, provinsi dan daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan dasar hukum tentang desentralisasi fiskal, menjelaskan pembagian baru mengenai sumber pemasukan dan transfer antar pemerintah.

Berdasarkan perundang-undangan ini, ada peralihan fungsi yang cukup besar dari pemerintah pusat langsung ke pemerintah daerah tanpa melalui provinsi. Kota dan kabupaten menjadi bertanggungjawab dalam penyediaan sebagian besar pelayanan umum. Namun berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 pemerintah pusat tetap memegang tanggungjawab untuk sistem hukum, masalah keagamaan, pertahanan dan keamanan nasional, perencanaan ekonomi makro, masalah keuangan dan moneter, hubungan internasional dan standarisasi; sementara tanggung jawab wajar lainnya

dilimpahkan, pemerintah daerah belum sepenuhnya memiliki sumber daya, pemasukan dan kapasitas kelembagaan yang memadai untuk memenuhi tanggung jawab tersebut.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut tidak dapat dipungkiri dalam menjalankan otonomi sepenuhnya implementasinya diperlukan dana yang memadai. Sebagai daerah otonom, daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah yang digali dari dalam wilayah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah menjadi sumber PAD maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dalam rangka desentralisasi itulah maka daerah-daerah diberi otonomi, yaitu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Karena makna substantif otonomi itu sebenarnya adalah pengakuan pentingnya kemandirian.

Dari uraian yang disampaikan data bahwa ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah; 1) Kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. 2) Ketergantungan kepada sumber keuangan terbesar yang didukung juga oleh kebijakan perimbangan keuangan pemerintahan pusat dan daerah sebagai

prasyarat dalam sistem pemerintahan Negara. Dengan kata lain, keberhasilan pengembangan otonomi daerah bisa dilihat dari derajat desentralisasi fiskal daerah yaitu perbandingan antara PAD dengan total penerimaan APBD-nya yang semakin meningkat.

Dalam operasionalisasinya, kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari struktur APBD-nya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintahan dan program-program pembangunan. Namun, dalam implementasinya banyak daerah yang memiliki struktur kontribusi PAD relatif kecil terhadap total penerimaan daerah, sebaliknya sebagai penerimaan pendapatan terbesar justru berasal dari pendapatan pemerintah instansi lebih tinggi, hal ini menunjukkan ketergantungan yang sangat besar dari pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Dana untuk membiayai pembangunan daerah terutama digali dari sumber kemampuan keuangan sendiri dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain, pemerintah daerah dipacu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin dalam membelanjai urusan rumah tangganya sendiri, dengan cara menggali segala sumber dana yang potensial yang ada di daerah tersebut.

Demikian halnya dengan pembangunan yang ada di pemerintah Kabupaten Flores Timur, dimana untuk jangka panjang Pendapatan Asli Daerah diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan daerah sehingga

mampu membiayai sendiri pembangunan yang ada di Kabupaten Flores Timur dan dampaknya dapat mengurangi ketergantungan dari bantuan pemerintah pusat berupa dana perimbangan (Dana Bagi Hasil, DAU dan DAK).Sejauh ini peranan dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan di Kabupaten Flores Timur sangat penting dan diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan kemandirian berotonomi.

Tabel 1.1
Realisasi PAD dan Pendapatan Daerah Kab. Flores Timur
Tahun Anggaran 2011-2016

(dalam rupiah)

Tahun	PAD	Pendapatan Daerah	Kontribusi (%)
2011	21,374,790,940	538,293,973,176	3.97
2012	29,107,671,569	572,321,443,691	5.09
2013	30,421,157,068	655,602,184,274	4.64
2014	44,528,326,886	747,030,357,455	5.96
2015	47,561,063,030	845,682,840,086	5.62
2016	50,183,797,225	1,057,777,224,998	4.74
Total	223,176,806,718	4,416,708,023,680	5.05

Sumber data :BPPKAD Prov. NTT (data diolah)

Datatable 1.1 diatas menunjukan bahwakontribusi dari pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah sangat rendah dan cenderung fluktuatif, dimana tahun 2011 realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah sebesar 3,97% , dan meningkat pada tahun 2012 sebesar

5,08% namun pada tahun 2013 menurun menjadi 4,64% kemudian meningkat lagi pada tahun 2014 sebesar 5,96% namun pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan sebesar 5,62% dan pada tahun 2016 juga mengalami penurunan sebesar 4,74%. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan PAD belum maksimal. Untuk itu perlu adanya upaya yang lebih maksimal yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan PAD secara optimal ialah dengan mengenal potensi dari masing-masing sumber PAD yang dimiliki. Dan untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah dilakukan analisis potensi PAD. Analisis ini menggunakan analisis pemetaan potensi. Hal ini dimaksudkan agar setiap daerah dapat mengenal dan mengetahui lebih dalam mengenai sumber PAD mana yang lebih berpotensi memberikan kontribusi terhadap penerimaan PAD. Dan hasil analisis potensi PAD diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan upaya pengembangan dan tata kelola pemungutan serta penerimaan sumber-sumber PAD sesuai potensi yang dimiliki daerah bersangkutan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pemetaan Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2012-2016”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2012-2016 ?
2. Bagaimana potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Flores Timur berdasarkan analisis Tipologi Klassen?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2012-2016.
2. Untuk mengetahui Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Flores Timur berdasarkan analisis Tipologi Klassen.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Flores Timur, sebagai bahan masukan dan informasi agar dalam mengelola pendapatan daerah lebih memperhatikan sumber-sumber potensi Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki.
2. Bagi peneliti selanjutnya, dapat digunakan sebagai bahan informasi dan bahan perbandingan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan Analisis Pemetaan Potensi Pendapatan Asli Daerah.